

BURSA & FINANSIAL

**BSI Pimpin Sindikasi Syariah
Proyek Tol Serang-Panimbang**

NERACA

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memimpin pembiayaan sindikasi syariah untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol Serang-Panimbang yang total investasinya mencapai Rp8,5 triliun. BSI berperan sebagai Joint Mandated Lead Arranger (JMLA) dengan porsi pembiayaan yang terbentuk senilai Rp4,45 triliun terdiri dari porsi syariah Rp1,8 triliun dan porsi konvensional Rp2,65 triliun.

Direktur Wholesale Transaction Banking BSI Kusman Yandi mengatakan, sindikasi tersebut merupakan bentuk nyata partisipasi BSI dalam membangun peradaban dan perekonomian bangsa melalui pengembangan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah. "BSI siap mengemban amanah ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan selalu berkomitmen akan mendukung pengembangan infrastruktur untuk mendorong roda ekonomi Tanah Air. Kepercayaan memimpin sindikasi pembiayaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi BSI, karena dilakukan dengan sistem Syariah," ujar Kusman, sebagaimana dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Adapun partisipan pemberi fasilitas Syariah adalah BSI, PT SMI (UUS) Usaha Syariah, Bank Aceh, Bank PaninDubaiSyariah, BPD Sumatera Utara (UUS). Selain sebagai JMLA, BSI juga berperan sebagai Agen Fasilitas Syariah.

Pembiayaan itu digunakan oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang untuk pembangunan Jalan Tol dengan panjang ruas 83 kilometer yang terbagi dalam tiga seksi, di mana terdapat dukungan dari pemerintah untuk membangun seksi 3 sepanjang 33 Km. Dengan demikian porsi WSP adalah seksi 1 dan seksi 2 sepanjang 50 Km.

Jalan tol itu menghubungkan ruas tol Tangerang-Merak dengan lokasi pariwisata Tanjung Lesung. Adanya pembangunan jalan tol tersebut ditujukan untuk mempercepat pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Banten. Dengan pembiayaan sindikasi itu, BSI berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten melalui pertumbuhan ekonomi dan menghubungkan ekonomi wilayah di dalam provinsi Banten.

Pembiayaan merupakan upaya BSI dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi Proyek Strategis Nasional. Pada sindikasi itu, akad yang digunakan adalah Mmusyarakah mutanaqisah yaitu akad kerjasama antara dua pihak dalam kepemilikan aset dimana porsi kepemilikan salah satu pihak berkurang disebabkan adanya pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (hishshah).

Kusman menambahkan, pembiayaan sindikasi merupakan salah satu strategi BSI dalam meningkatkan pembiayaan wholesale. Hingga kuartal I 2021, BSI telah menyalurkan pembiayaan wholesale hingga Rp46,97 triliun. Pada semester II 2021, BSI akan fokus pada beberapa sektor industri seperti infrastruktur, energi, agribisnis dan telekomunikasi terutama proyek-proyek KPBU sebagai wujud dukungan kepada program pemerintah. **● bari**

**BTN Targetkan Pemulihan
Aset Diatas Rp2 Triliun**

NERACA

Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menargetkan pemulihan aset di atas Rp2 triliun sepanjang 2021 dari ribuan unit properti yang ditawarkan perseroan kepada investor. Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargo mengatakan, perseroan menawarkan 8.140 unit dengan nilai sekitar Rp3 triliun melalui gelaran Asset Sales Festival Nasional Bank BTN Tahun 2021 Adapun aset yang ditawarkan berupa rumah tapak, ruko, apartemen, proyek perumahan dan hotel.

Hingga Mei 2021, emiten berkode saham BBTN itu berhasil melakukan pemulihan aset senilai Rp423 miliar. Dengan adanya kegiatan festival tersebut, diharapkan jumlah pemulihan aset bisa bertambah lagi. "Tahun ini, kami menargetkan recovery aset mencapai Rp2,1 triliun," ujar Haru, seperti dikutip Antara, kemarin.

Haru pun mengajak investor yang tertarik dengan sektor properti untuk bisa ikut dalam Asset Sales Festival Nasional Bank BTN tersebut mengingat banyak properti yang potensial dan menguntungkan. Kegiatan Asset Sales Festival tahun ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang diadakan di lima kota tahun lalu. Tahun ini, setelah Yogyakarta, rencananya Asset Sales Festival akan digelar di Jakarta dan Surabaya. "Tahun lalu dari acara Asset Sales Festival ini, aset yang berhasil dijual Rp513 miliar. Tahun ini kami targetkan Rp600 sampai Rp700 miliar," kata Haru. **● bari**



NERACA/handout/humasbsi/fo/ind

KERJASAMA : Wakil Direktur 2 Bank Syariah Indonesia Abdullah Firman Wibowo (empat dari kiri) menandatangani perjanjian kerjasama Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas Jasa Perbankan Syariah dengan Kapolda Banten Ir Jen. Pol. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho (tiga dari kiri), Senin (21/6/2021). Kerjasama ini berfokus pada pengelolaan keuangan Polda Banten sehingga transaksi keuangan lebih terkontrol, akuntable, cepat dan real time, bisa diakses dimanapun dan kapanpun.

**Penyaluran Pembiayaan
UMi Capai Rp14,1 Triliun**

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai Rp14,1 triliun bagi 4,31 juta debitur atau setara 108 persen dari total target debitur sebanyak 4 juta per 30 April 2021. "UMi sekarang sudah 4,3 juta debitur, pinjamannya Rp14,1 triliun di 494 kabupaten/kota, 34 provinsi. Ini adalah kenaikan yang cukup konsisten dalam empat tahun terakhir," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (21/6).

■ NERACA

Sri Mulyani menyatakan target debitur dan penyaluran terus meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu pada 2017 mencapai Rp753,24 miliar kepada 307 ribu debitur atau 102 persen dari target 300 ribu debitur. Kemudian Rp1,56 triliun kepada 557 ribu debitur atau 111

persen dari target 500 ribu debitur pada 2018 dan Rp-2,71 triliun kepada 809 ribu debitur atau 135 persen dari target 600 ribu debitur pada 2019.

Selanjutnya Rp6,01 triliun kepada 1,76 juta debitur atau 220 persen dari target 800 ribu debitur pada 2020 dan Rp3,1 triliun kepada 879 ribu debitur atau 49 persen dari target 1,8 juta debitur

per 30 April 2021.

Tak hanya itu Sri Mulyani menuturkan dari sisi jumlah penyalur dan wilayah terlayani pembiayaan UMi juga mengalami peningkatan yakni sebanyak sembilan penyalur pada 2017 terhadap 372 kabupaten/kota dan 18 penyalur terhadap 422 kabupaten/kota pada 2018.

Berikutnya 40 penyalur terhadap 458 kabupaten/kota pada 2019, 46 penyalur terhadap 491 kabupaten/kota pada 2020, dan 47 penyalur terhadap 494 kabupaten/kota pada 2021. Ia menjelaskan penyaluran pembiayaan UMi terkonsentrasi di Pulau Jawa menyangkut sebaran jumlah penduduknya yang mencapai 55 persen dan jumlah pelaku usaha mikro sebanyak 61 persen pada 2017 sampai 2021.

Secara rinci, untuk Su-

matera penyaluran UMi dilakukan kepada 741 ribu debitur atau 17,17 persen dari total realisasi, Jawa 3,1 juta debitur atau 71,83 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara 185 ribu debitur atau 4,29 persen. Selanjutnya Maluku dan Papua 13 ribu debitur atau 0,3 persen, Sulawesi 201 ribu debitur atau 4,66 persen, serta Kalimantan 75 ribu debitur atau 1,74 persen.

Sri Mulyani menuturkan melalui pembiayaan UMi ini menunjukkan instrumen pemerintah berupaya menjangkau seluruh segmen UMKM yang beragam dari pinjaman Rp10 juta hingga Rp10 miliar. "Ini tujuannya karena memang COVID-19 tidak memandang hulu dan semuanya terkena sehingga kita mencoba memberikan dukungan melalui berbagai jalur," tegasnya. **● bari**

**Prudential Gandeng PasarPolis
Tingkatkan Akses Asuransi**

NERACA

Jakarta – PT Prudential Life Assurance menggandeng perusahaan piang asuransi PT PasarPolis Insurance Broker (PPIB), afiliasi dari PT PasarPolis Indonesia (PasarPolis), sebagai salah satu perusahaan insurancetechnology (insurtech) di Indonesia dan Asia Tenggara, untuk meningkatkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap asuransi.

Chief Digital & Transformation Officer Prudential Indonesia Premraj Thuraisingam dalam pernyataan mengatakan, pihaknya percaya teknologi berperan penting dalam upaya memperlu-

as cakupan layanan agar semakin banyak masyarakat Indonesia serta keluarga mereka yang terlindungi.

Untuk itu, lanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir, perseroan fokus pada transformasi digital dan membangun ekosistem digital yang terintegrasi melalui perluasan kemitraan dengan pemain-pemain terkemuka di sektor teknologi.

"Kemitraan antara Prudential Indonesia dan PasarPolis dalam memasarkan PRUTect Care – Hospital Cash merupakan strategi kami dalam menghadirkan layanan kesehatan dan keuangan yang dapat diakses secara cepat, mudah, dan terjangkau oleh seluruh

lapisan masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat hidup lebih sehat dan sejahtera," ujar Premraj.

Melalui kemitraan strategis tersebut, Prudential memberikan perlindungan melalui salah satu produk andalannya, Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah PRUTect Care – Hospital Cash (PRUTect Care – Hospital Cash), kepada masyarakat luas melalui PasarPolis. Premraj menyampaikan, PRUTect Care – Hospital Cash merupakan produk asuransi jiwa Syariah berbasis digital yang memberikan perlindungan menyeluruh dengan kontribusi terjangkau dan dapat diakses secara mudah. Produk tersebut memberikan manfaat dasar

meninggal dunia, santunan harian rawat inap (non-ICU dan ICU), santunan cacat total tetap akibat kecelakaan, santunan meninggal dunia akibat penyakit menular, dan total santunan meninggal dunia akibat kecelakaan hingga Rp63 juta untuk paket platinum.

Pengguna dapat memilih dua jenis masa kesepertaan yakni per enam atau 12 bulan dengan kontribusi yang sangat terjangkau mulai dari Rp5.000-an per bulan. Nasabah juga dapat melakukan proses klaim dengan mudah secara daring melalui Pulseby Prudential, aplikasi kesehatan dan kebugaran all-in-one dari Prudential Indonesia yang didukung kecerdasan buatan. **● bari**

PENGUMUMAN

PT Margo Karya Mandiri ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa telah dilakukan Konversi atas Hutang Perseroan menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yang diambill bagian oleh PT Mutiara Tambang Nusantara, sehingga menyebabkan perubahan struktur permodalan dan perubahan pengendalian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Indra Tjajira Rinanto, SH, Notaris di Jakarta.

Demikian pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 22 Juni 2021
Direksi
PT. Margo Karya Mandiri

Enjiniring, Pengadaan & Konstruksi Fasilitas Lawe-Lawe RDMP Rv - Proyek Balikpapan Proyek Konstruksi SPM dan Pipa Lepas Pantai

PT. Pertamina (Persero) (selanjutnya disebut "Pertamina") berencana untuk mengembangkan fasilitas Minyak Mentah untuk terminal Lawe - Lawe. Pengembangan fasilitas merupakan bagian dari Rencana Induk Pengembangan Kilang Minyak (Proyek RDMP). Unit Kilang Minyak V Balikpapan di Kalimantan Timur. Proyek ini diberikan kepada Kerjasama Operasi dan China Petroleum Engineering Co., Ltd (selanjutnya disebut "CPP") dan Hutama Karya (Persero). CPP telah memperoleh persetujuan sebelumnya dari Pertamina dan bermaksud untuk mensubkontrakan pekerjaan Pengawasan, Survey dan Inspeksi.

Informasi tender adalah sebagai berikut:

- **Pemberi Tender:** China Petroleum Pipeline Engineering Co., Ltd.
- **Nama Proyek tender:** Enjiniring, Pengadaan & Konstruksi Fasilitas Lawe-Lawe RDMP Rv - Proyek Balikpapan Proyek Konstruksi SPM dan Pipa Lepas Pantai
- **Tempat konstruksi:** Panajam, Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia
- **Ruang lingkup tender:** Satu paket pekerjaan pengawasan, survey dan inspeksi
- **Kualifikasi peserta tender:** Memiliki sertifikat ISO 9001/14001/45001, memiliki kelengkapan dokumen perusahaan yang sah, Domisili perusahaan lokal di Indonesia untuk mendukung manajemen proyek setidaknya 2 tahun, Berpengalaman dalam layanan konsultasi setidaknya 3 tahun, Berpengalaman dalam bidang survei dan inspeksi setidaknya 3 tahun, Berpengalaman sebagai konsultan utama setidaknya selama 3 tahun, Memiliki pengalaman di Perusahaan Inspeksi Internasional setidaknya 2 tahun, Memiliki sumber daya manusia yang memadai termasuk Engineer, surveyor, tenaga inspeksi, Memiliki peralatan survei, Memiliki kapal survei.

Kontak
• Bapak Wang Chunsheng
Nomor ponsel : +62 8131581888
Alamat email : cpp@offshore_bid@613.com
Alamat kantor : GAMA Tower, Lantai 19, Suite H, H.R. Rasuna Said Kav. C-22 Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia

Calon penawar yang tertarik dengan tender ini harus mengirim surat resmi minat dengan stempel perusahaan ke email kontak di atas sebelum waktu Jakarta 10:00, 26 Juni 2021.

IDP **Sonataour**

**PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada :

**Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juli 2021
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Mayapada Tower II Lantai 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav 28**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Pemanggilan RUPST akan dimuat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek, dan situs web Perseroan pada tanggal 7 Juli 2021.

Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam RUPST tersebut, hanyalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, telp (021) 29745222, Fax : (021) 29289961, pada tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 10 dan ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPST, dan Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

**Jakarta, 22 Juni 2021
PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.
DIREKSI**

PERBANKAN

**Askrindo Jamin Kredit
UMKM Rp4,8 Triliun**

NERACA

Jakarta – PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) telah memberikan penjaminan sekitar Rp4,8 triliun kepada sebanyak 8.130 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepanjang periode Januari-Mei 2021. Dukungan penjaminan dilakukan guna memperkuat pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengurangi lonjakan kredit bermasalah yang tengah dihadapi perbankan nasional akibat pandemi virus corona yang berkepanjangan.

"Melalui penjaminan kredit modal kerja ini, kami berharap bisa meningkatkan permodalan pelaku UMKM, sekaligus menurunkan risiko kredit perbankan," kata Direktur Operasional Askrindo Erwan Djoko Hermawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/6). Berdasarkan wilayah, Jawa Tengah dan Jawa Timur mendominasi penyerapan penjaminan, dengan serapan Solo mencapai Rp228 miliar, diikuti Surabaya sebesar Rp215,6 miliar dan Semarang sekitar Rp201,1 miliar.

Sementara itu, berdasarkan sektor usaha, penjaminan kredit modal kerja yang diberikan Askrindo masih didominasi sektor perdagangan dengan plafon mencapai Rp3,3 triliun, penjaminan jasa dan sektor lainnya sebesar Rp363 miliar, penjaminan bagi sektor pertanian dan kehutanan sekitar Rp357 miliar. Askrindo menilai besarnya penyerapan sektor perdagangan menjadi indikasi semakin kuatnya pemulihan daya beli masyarakat serta gerak perekonomian yang semakin membaik.

Ke depan, anak usaha Indonesia Financial Group (IFG) itu tetap berkomitmen untuk berpartisipasi memperkuat pemulihan ekonomi nasional khususnya melalui penjaminan kredit ke segala sektor usaha yang kredibel, serta membantu perbankan dalam mengurangi rasio kredit macet, di tengah upaya pemerintah dan regulator mengurangi dampak lonjakan kredit bermasalah perbankan akibat COVID-19.

Sebagai salah satu BUMN asuransi terbesar milik pemerintah, Askrindo sejak 2007 telah mendapat tugas untuk memberikan penjaminan bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak 2020, pemerintah kembali mengizinkan Askrindo untuk melaksanakan penjaminan UMKM program PEN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 71/2020 dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, serta kesinambungan fiskal. **● bari**

**OJK Diminta Kawal Konversi
Bank Nagari ke Syariah**

NERACA

Padang - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menegakan penuntasan proses konversi Bank Nagari dari sistem konvensional menuju syariah sesuai amanat RUPS pada 2019. "Proses untuk konversi ini sudah dimulai sejak 2019, namun belum terwujud. Kami minta OJK bisa mengawal penuntasan proses ini secepatnya," katanya di Padang, Senin (21/6).

Ia mengatakan itu saat menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran OJK Sumbar yang baru saja berganti pimpinan dari Misran Pasaribu kepada Yusri. Misran yang sudah satu tahun lebih bertugas di Sumbar dimutasi ke Kantor Perwakilan Jawa Barat sementara penggantian Yusri sebelumnya bertugas sebagai Kepala OJK Riau.

Mahyeldi mengatakan masyarakat Sumbar dikenal menjunjung tinggi prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sehingga kebijakan konversi Bank Nagari dari konvensional menuju syariah merupakan langkah tepat. Berhubung saat ini ada 11 kepala daerah yang baru menjabat usai pilkada serentak lalu, maka diperlukan sosialisasi kembali agar proses konversi berjalan dengan baik.

Sementara itu Kepala OJK Sumbar yang lama, Misran Pasaribu mengatakan ada dua pekerjaan rumah OJK yang masih dalam proses di Sumbar yaitu penuntasan konversi Bank Nagari dan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). "Untuk konversi, karena tidak ada hasil RUPS yang menyatakan prosesnya dihentikan, maka OJK akan terus membantu hingga tuntas. Selain Bank Nagari saat ini ada belasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumbar yang sudah mengajukan usul untuk konversi ke syariah. Dua diantaranya sudah diberikan izin oleh OJK," katanya.

Untuk TPAKD tinggal dua daerah yang belum membentuk yaitu Padang Pariaman dan Mentawai. Tugas tersebut nantinya akan dilanjutkan oleh pejabat yang baru. Kepala OJK Sumbar yang baru dilantik, Yusri akan melanjutkan tugas dari pejabat sebelumnya termasuk mendukung penuh keputusan pemegang saham melalui RUPS terkait konversi Bank Nagari. "Apapun keputusannya kami akan dukung dan kawal hingga tuntas," katanya.

Berdasarkan pengalaman, katanya, konversi dari konvensional ke syariah tidak membuat penurunan laba yang signifikan seperti yang terjadi di Aceh dan NTB. Ia juga minta dukungan pada gubernur agar pembentukan TAPD pada dua daerah di Sumbar bisa segera dilakukan sehingga sosialisasi dan penyampaian program terkait ekonomi dan keuangan bisa berjalan dengan lancar.

Proses konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar atau Bank Nagari juga mendapatkan dukungan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Komisaris Utama Bank Nagari Benny Warlis di Padang, Minggu menyampaikan dukungan kedua lembaga tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi.

"BPKH telah menempatkan dana di Bank Nagari dan Gubernur Sumbar sudah bertemu langsung dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Iskandar Zulkarnain meminta dukungan," kata dia. Pada pertemuan tersebut konversi bank nagari menjadi bank syariah menjadi perhatian dan mendapat dukungan besar BPKH.

BPKH juga akan menambah penempatan dana serta juga akan mencari solusi jika nanti ada kendala dalam menerapkan sistem syariah.

"BPKH akan membantu dan mencari solusi, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dan kepada para nasabah Bank Nagari selama ini juga nanti menjadi bank nagari syariah akan sama saja tidak perlu dikhawatirkan," kata dia. Selain itu BSI juga menyatakan dukungan atas proses konversi Bank Nagari menjadi syariah. **● bari**